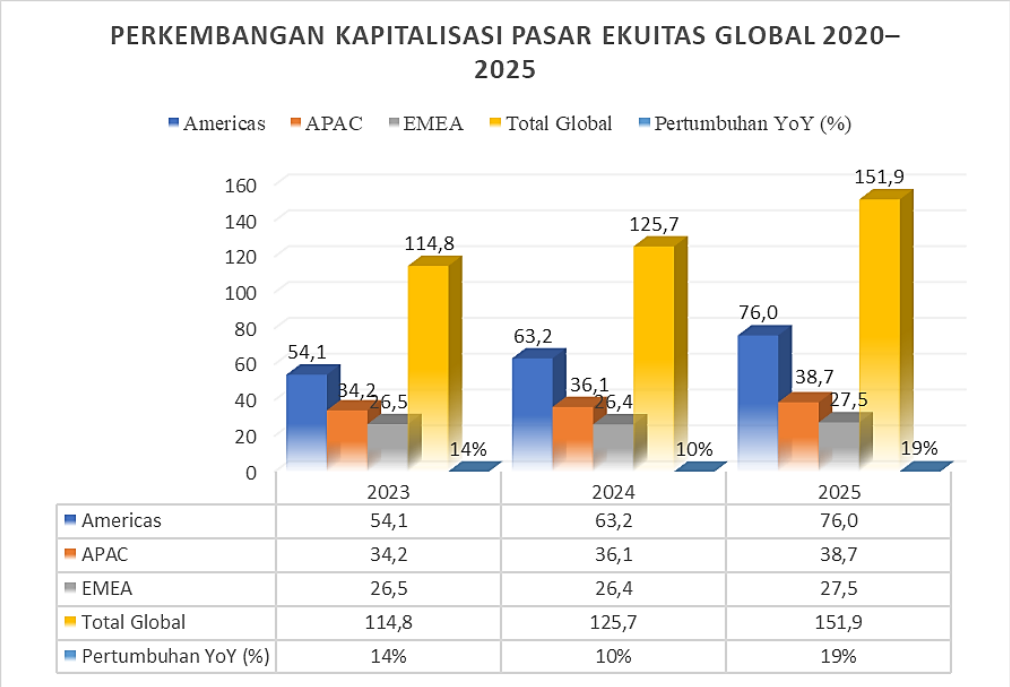
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal merupakan indikator penting dalam sistem perekonomian global yang memiliki fungsi untuk menghubungkan pihak yang surplus dana dengan pihak yang membutuhkan untuk investasi dan pengembangan usaha, yang mana dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menstabilkan siklus bisnis secara signifikan (Konstantakopoulou, 2023). Pasar modal merupakan sumber utama bagi investor, pemerintah, dan asosiasi dalam mengalokasikan sumber daya keuangan, yang mana modal yang sudah terhimpun dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis, berinvestasi dalam teknologi baru, serta mendanai pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (SIFMA, 2024). Kapitalisasi pasar ekuitas global saat ini mencerminkan peningkatan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan, kondisi ini terbukti meningkat secara signifikan dari 101, 2 triliun dolar AS pada tahun 2022, 114,8 triliun dolar AS pada tahun 2023 meningkat sebesar 13,44%, dan pada tahun 2024 mencapai rekor tertinggi sebesar 125,7 triliun dolar AS atau meningkat sebesar 9,49%(*The World Federation of Exchanges*, 2025).



	2023	2024	2025
Americas	54,1	63,2	76,0
APAC	34,2	36,1	38,7
EMEA	26,5	26,4	27,5
Total Global	114,8	125,7	151,9
Pertumbuhan YoY (%)	14%	10%	19%

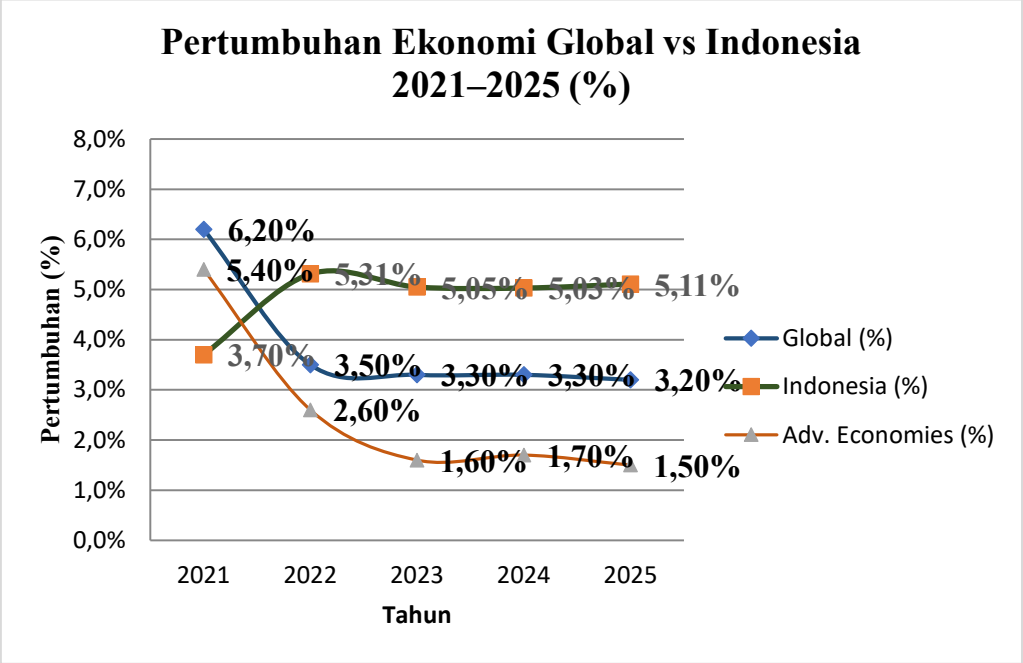
Gambar 1. 1 Perkembangan kapitalisasi pasar ekuitas global 2023 - 2025

Sumber: (*World Federation of Exchanges* (WFE), 2025)

Berdasarkan data *World Federation of Exchanges* (*World Federation of Exchanges* 2025), perkembangan kapitalisasi ekuitas global pada periode 2023 – 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dengan laju yang berfluktuasi. Ditinjau berdasarkan kawasan, kapitalisasi pasar global secara konsisten didominasi oleh kawasan Amerika dengan kontribusi sebesar USD 54.1 triliun pada tahun 2023, tahun 2024 USD 63,2 triliun, dan tahun 2025 USD 76,0 triliun, yang didorong oleh pertumbuhan utama saham. Kawasan Asia – Pasifik (APAC) mencatat pertumbuhan secara moderat dari USD 34,2 triliun menjadi USD 38,7 triliun selama periode yang sama tumbuh sebesar 13,16% secara *year – on – year*. Pada kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) relatif stagnan kapitalisasi pada tahun 2023 – 2025 sebesar USD 26,5 triliun, USD 26,4 triliun, dan USD 27,5 triliun (*World Federation of Exchanges*, 2026). Pertumbuhan kapitalisasi pasar

ekuitas global yang signifikan tidak terlepas oleh peran sistem intermediasi keuangan yang berjalan efisien melalui pasar modal. Sistem intermediasi keuangan yang efisien melalui pasar modal dapat dilihat dengan mampu meminimalkan biaya transaksi, mengurangi asimetri informasi, dan mendiversifikasi risiko investasi, sehingga dapat memicu partisipasi investor secara luas (Alduais et al., 2023). Pasar modal memiliki peran besar sebagai penggerak ekonomi sehingga kondisi pertumbuhan GDP global menjadi faktor yang tidak terpisahkan, sebab ekspansi maupun perlambatan ekonomi secara nyata dapat membentuk sentimen investor, arus investasi, dan trajektori perkembangan pasar modal di seluruh dunia (Pandey, 2025).

Pertumbuhan ekonomi global dalam tiga tahun terakhir menunjukkan lintasan yang bersifat non – linear, ditandai dengan perlambatan yang bertahap dan berkelanjutan. Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* Oktober 2023, *International Monetary Fund* (IMF) mencatat bahwa pertumbuhan GDP global tercatat sebesar 3,5% pada tahun 2022, kemudian melambat menjadi 3,3 pada tahun 2023 dan tetap stabil di angka 3,3% di tahun 2024, sebelum kembali melambat menjadi 3,2% pada tahun 2025, seluruh capaian ini berada di bawah rata – rata historis periode 2000 – 2019 yang mencapai 3,8%.



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Global vs Indonesia 2021–2025

Sumber diolah: (IMF *World Economic Outlook* 2025; BPS Indonesia 2026)

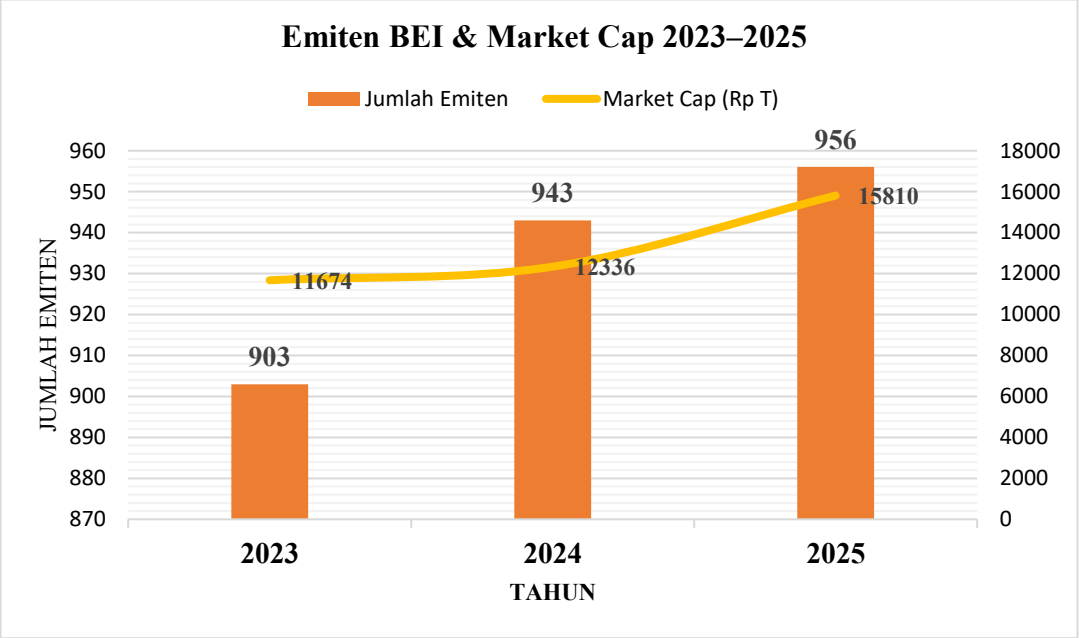
Grafik diatas menyajikan data perbandingan laju pertumbuhan GDP rill tahunan antara ekonomi global, Indonesia, dan kelompok ekonomi maju (*advanced economies*) selama periode 2021 – 2025. Data pertumbuhan GDP global menunjukkan tren perlambatan yang bertahap, dari 6,2% pada tahun 2021 menjadi 3,5% pada tahun 2022, kemudian 3,3% pada 2023, stabil di 3,3% pada 2024, sebelum diperkirakan melambat menjadi 3,2% pada tahun 2025 *(International Monetary Fund*, 2025a). Kelompok ekonomi maju mencatat perlambatan yang signifikan, dari 5,4% pada 2021 turun drastis menjadi 2,6% pada 2022, dan terus melemah hingga 1,6% pada 2023, 1,7% pada 2024, serta diproyeksikan hanya 1,5% pada 2025, hal ini menunjukkan tekanan akumulasi dari pengetatan moneter dan pelemahan permintaan domestik di negara – negara maju *(International Monetary Fund*, 2025a).

Indonesia menunjukkan ketahanan pertumbuhan yang konsisten dikisaran 5%, dengan capaian 5,31% pada 2022, 5,05% pada 2023, 5,03% pada 2024, dan 5,11% pada tahun 2025, hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan tertinggi ditengah perlambatan global (Badan Pusat Statistik, 2024, 2025, 2026). Tren ini dilanjutkan dengan pemulihan yang bertahap, dimana *World Economic Outlook* pada Januari 2025 memproyeksikan pertumbuhan global tetap di kisaran 3,30% pada tahun 2025 dan 2026, terutama didorong oleh perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang mengimbangi perlambatan di berbagai ekonomi utama lainnya *(International Monetary Fund*, 2025b). *World Bank* melalui laporan *Global Economic Prospects* Januari 2025 mengungkapkan capaian sekaligus kekhawatiran, dimana pertumbuhan GDP per kapita global telah melampaui level tahun 2019 sekitar 10%, namun lebih dari seperempat negara berkembang masih belum mampu memulihkan pendapatan perkapita ke level pra pandemi akibat kesenjangan kapasitas kebijakan yang berbeda – beda di setiap negara (World Bank, 2025a).

Beragamnya kondisi pertumbuhan ekonomi global memberikan dampak langsung terhadap pasar modal, karena dinamika GDP mencerminkan kapasitas investasi, kepercayaan pelaku pasar, serta prospek arus modal lintas negara (Pandey, 2025). Pertumbuhan GDP di ekonomi berkembang terbukti didorong secara signifikan oleh keterbukaan keuangan dan perdagangan melalui alokasi sumber daya yang efisien, transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas dengan stabilitas makro ekonomi sebagai faktor pendukungnya (Seti et al., 2025). Lebih dari itu, GDP sebagai fundamental makro ekonomi memiliki keterkaitan dinamis

dengan perkembangan pasar saham melalui mekanisme transmisi guncangan dan *spillover* Risiko yang bergantung pada kondisi pasar yang terjadi (Ben Salem et al., 2025). Kerentanan pasar modal terhadap guncangan makroekonomi dan spillover Risiko sebagimana ditunjukkan oleh dinamika GDP dan arus modal global menegaskan bahwa kualitas pelaporan keaungan emiten menjadi faktor penentu dalam menjaga kepercayaan investor dan efisiensi alokasi modal di pasar berkembang (OECD, 2023; Zhang, 2024).

Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Kawasan Asia Tenggara sekaligus salah satu *emerging market* paling strategis dalam tatanan ekonomi global, menduduki posisi ke – 17 dalam peringkat Produk Domestik Bruto (PDB) nominal dunia dan manjadi anggota aktif G20 yang mencerminkan bobot geokonominya di tingkat internasional (*World Bank*, 2024). Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pusat mobilisasi modal nasional yang mencatat ekspansi yang signifikan, dimana jumlah emiten tercatat tumbuh dari 903 perusahaan pada 2023 menjadi 943 perusahaan pada 2024, dan mencapai 956 perusahaan pada akhir Desember 2025, menjadikan BEI salah satu bursa paling aktif dari sisi pencatatan perdana saham di Kawasan ASEAN (Bursa Efek Indonesia, 2025a). Dari sisi kapitalisasi pasar, BEI mencatat nilai sebesar Rp 11.674 triliun pada akhir 2023 dan meningkat menjadi Rp 12.336 triliun pada akhir 2024, sebelum kemudian tumbuh secara substansial menjadi Rp 15.810 triliun pada akhir 2025 setara dengan pertumbuhan 28,16% secara *year – on – year* berdasarkan Siaran Pers resmi OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).



Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah Emiten dan Kapitalisasi Pasar BEI Tahun 2023–2025

Sumber diolah: (Bursa Efek Indonesia, 2025a; Otoritas Jasa Keuangan, 2025)

Sebagaimana terlihat pada gambar 1.3, jumlah emiten BEI meningkat secara konsisten dari 903 perusahaan pada 2023 menjadi 943 perusahaan pada 2024 atau tumbuh sebesar 4,43%, kemudian pada tahun 2025 meningkat menjadi 956 perusahaan tumbuh sebesar 1,38%, sementara kapitalisasi pasar tumbuh signifikan dari Rp 11,674 triliun menjadi Rp 15,810 triliun pada periode yang sama, hal ini mencerminkan ekspansi kapasitas pasar modal Indonesia yang substansial (Bursa Efek Indonesia, 2025a; Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Dari sisi arus modal asing, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia mencapai Rp 744 triliun setara dengan USD 47,5 miliar pada 2023 dengan pertumbuhan 13,7% secara *year – on – year*, lalu meningkat menjadi Rp 900,2 triliun pada 2024 dengan kontribusi PMA mencapai 52,5% dari total realisasi investasi nasional (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2025). Pertumbuhan PMA yang konsisten dapat dipengaruhi oleh kualitas informasi keuangan yang

disampaikan emiten, sebab asimetri informasi yang tinggi dapat memperlemah alokasi modal di pasar berkembang(Akerlof, 1970). Persoalan teridentifikasi melalui dua indikator di pasar modal Indonesia, yaitu pergerakan IHSG dan tren sanksi keterlambatan pelaporan yang dijatuhkan oleh OJK kepada emiten.

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggambarkan kondisi pasar modal Indonesia secara keseluruhan, dengan penutupan pada tahun 2022 di level 6.850,62, tahun 2023 sebesar 7.272,80, tahun 2024 sebesar 7.079,91, pada tahun meningkat menjadi 8.646,94, lalu pada Januari 2026 mencapai rekor tertinggi di level 9.134,70 (Bursa Efek Indonesia, 2025b). Data penegakan hukum OJK mencatat tingginya frekuensi pelanggaran disektor jasa keuangan, tahun 2023 sebanyak 4.317 sanksi administratif dijatuhkan di lima sektor jasa keuangan (Wattimena, 2024), sementara itu pada sektor pasar modal selama 2024 sebanyak 55 pihak dikenai sanksi substantif dengan total denda Rp 22,375 lalu ditambah denda keterlambatan pelaporan senilai Rp 33,829 miliar kepada 328 pihak lainnya (Santosa, 2024).

Selain pelanggaran substantif, permasalahan kepatuhan pelaporan keuangan di pasar modal Indonesia terlihat pada tren peningkatan sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan yang dijatuhkan oleh OJK terhadap emiten yang tercatat. Permasalahan kualitas laporan keuangan di pasar modal Indonesia masih ditandai dengan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan oleh emiten kepada regulator, OJK telah menetapkan batas waktu penyampaian laporan keuangan secara tegas, di mana keterlambatan pelaporan merupakan pelanggaran administratif tetapi mengindikasikan rendahnya kualitas

pelaporan keuangan yang tercermin dari kurang optimalnya ketepatan waktu penyampaian informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Sumber diolah: (Arini, 2023; Hakim, 2023; Kominfo Jatim, 2024; StockWatch, 2026).



Gambar 1. 4 Perkembangan Sanksi Denda Keterlambatan Pelaporan Keuangan di Pasar Modal Indonesia Periode 2022–2025

Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sektor pasar modal selama periode 2022 – 2025. Berdasarkan data resmi OJK, meskipun jumlah pihak yang dikenai sanksi berfluktuasi, nilai denda yang dijatuhkan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, terdapat 276 pihak yang dikenakan sanksi dengan total denda Rp 12, 44 miliar, mencakup keterlambatan penyampaian laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan penggunaan dana (Arini, S.C 2023). Pada tahun 2023, jumlah pihak yang dikenai sanksi meningkat menjadi 350 pihak atau naik 26,81%, dengan nilai denda sebesar Rp 15,75 miliar tumbuh 26,61% dibanding tahun sebelumnya (Hakim, A. 2023). Dinamika yang berbeda

terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah pihak menurun menjadi 328 atau turun 6,29%, namun nilai denda justru melonjak menjadi Rp 33,83 miliar atau naik 114,8% disertai 56 peringatan tertulis (Kominfo Jatim, 2024). Pada tahun 2025 terjadi lonjakan yang signifikan, di mana jumlah pihak yang dikenai sanksi meningkat menjadi 638 pihak naik 94,5% dengan total denda Rp 50,38 miliar atau tumbuh 48,9% disertai dengan 219 peringatan tertulis (StockWatch, 2026). Tren ini menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan merupakan persoalan di pasar modal Indonesia, setelah diberlakukannya POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau Perusahaan public sebagai upaya pengetatan regulasi, sehingga memperkuat urgensi penelitian mengenai faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan emiten di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Bursa Efek Indonesia merespons kondisi tersebut dengan membentuk mekanisme Papan Pemantauan Khusus (PPK) sebagai instrumen pengawasan khusus terhadap emiten bermasalah, diimplementasikan secara bertahap pada 12 Juni 2023 melalui *hybrid call auction* hingga disempurnakan pada 25 Maret 2024 melalui *full periodic call auction*, dengan sektor *consumer cyclicals* tercatat mendominasi komposisi PPK sebesar 27,5% dari total 153 daftar efek terdapat 42 emiten, sehingga mengindikasikan bahwa emiten pada sektor *consumer cyclicals* secara proporsional paling banyak dan memenuhi kriteria kondisi fundamental bermasalah yang ditetapkan oleh BEI dibandingkan sektor lainnya (Bursa Efek Indonesia, 2024;Putrantyo, 2023). Papan Pemantauan Khusus (PPK) merupakan papan pencatatan yang disiapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk

menempatkan emiten tercatat yang memenuhi satu atau lebih kriteria kondisi fundamental maupun likuiditas perdagangan, sehingga PPK berfungsi bukan sebagai sanksi melainkan sebagai mekanisme *early warning system* untuk meningkatkan perlindungan investor di pasar modal Indonesia (Bursa Efek Indonesia, 2023). Landasan regulasi PPK bersumber dari Peraturan Bursa Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus yang berlaku mulai 12 Juni 2023, kemudian diperbarui melalui keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00076/BEI/06-2024 yang berlaku efektif pada 21 Juni 2024, hal ini guna memperketat periode evaluasi kriteria likuiditas serta memperjelas jalur keluar bagi emiten yang kondisinya telah membaik (Bursa Efek Indonesia, 2024c).

Terdapat 11 kriteria resmi yang menjadi dasar penempatan emiten di PPK, mencakup harga saham rata – rata di bawah RP 51 selama 3 bulan terakhir, opini *disclaimer* pada laporan keuangan audit, tidak hanya pendaptam, ekuitas negatif, ketidakpatuhan terhadap ketentuan *free floa*t, likuiditas rendah, kondisi PKPU atau pailit, suspensi perdagangan, hingga kondisi lain atas perintah OJK, di mana emiten yang memenuhi satu kriteria saja dapat ditempatkan di PPK (Bursa Efek Indonesia, 2023, Kompas.com, 2024).

Tabel 1. 1 Kriteria Masuk dan Syarat Keluar Papan Pemantauan Khusus (PPK) BEI

No.	Kriteria Masuk PPK	Syarat Keluar PPK
1	Harga rata – rata saham < Rp 51 selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler disertai nilai transaksi harian < Rp 5 juta dan volume < 10.000 saham.	Harga rata -rata dan likuiditas kembali di atas ambang batas, atau membagikan dividen tunai melalui RUPS dengan harga saham ≥ Rp 50.
2	Laporan keuangan di audit terakhir memperoleh opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*).	Laporan keuangan yang telah diaudit terbaru memperoleh opini selain *disclaimer*.

3	Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada LK auditan/interim terakhir.	Membukukan pendapatan atau terdapat perubahan pendapatan yang terverifikasi pada LK berikutnya.
4	Perusahaan tambang minerba belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke – 4 sejak tercatat di Bursa; atau merupakan induk Perusahaan yang memiliki Perusahaan terkendali di bidang minerba yang telah melakukan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahap penjualan.	Memulai penjualan dari core business pertambangan sesuai persyaratan BEI.
5	Memiliki ekuitas negative pada laporan keuangan terakhir.	Ekuitas Kembali positif yang dibuktikan dengan laporan keuangan auditan terbaru.
6	Saham *free float* < 50 juta lembar dan ≤ 5% dari total saham tercatat (Papan Utama/Pengembangan) atau saham free float ≤ 5% dari total saham tercatat (Papan AKselerasi).	Memenuhi Kembali ketentuan saham *free float*, atau terdaftar sebagai *Liquidity Provider* Saham
7	Nilai transaksi harian < Rp 5 jutan dan volume < 10.000 saham selama 3 bulan terakhir.	Likuiditas melampaui ambang batas, atau membagikan dividen tunai (RUPS), atau terdaftar sebagai *Liquidity Provider* Saham.
8	Perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian.	Proses PKPU/ pailit selesai dan kondisi Perusahaan tidak lagi memnuhi kriteria tersebut.
9	Anak Perusahaan yang kontribusi pendapatannya material berada dalam kondisi PKPU atau pailit.	Anak Perusahaan keluar dari kondisi PKPU/pailit atau kontribusinya tidak lagi material.
10	Dikenakan penghentian sementara perdagangan > 1 hari bursa akibat aktivitas perdagangan.	Telah berada di PPK selama 7 hari bursa (direvisi dari 30 hari kalender sejak 21 Juni 2024)
11	Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah OJK.	Kondisi yang ditetapkan BEI/OJK sudah tidak terpenuhi berdasarkan hasil evaluasi periodik.

Sumber : *BEI, Peraturan Nomor I-X (berlaku 12 Juni 2023) dan Kep-00076/BEI/06-2024 (revisi efektif 21 Juni 2024).* (Bursa Efek Indonesia, 2023, 2024c).

Berdasarkan tabel 1.1, dari 11 kriteria tersebut BEI memberikan syarat keluar yang spesifik dan berbeda – beda, mulai dari pemulihan harga dan likuiditas saham, ekuitas kembali positif, penyelesaian proses PKPU, hingga batas waktu minimal tujuh hari bursa untuk kasus suspensi perdagangan, sehingga emiten yang ingin keluar dari PPK harus menuntaskan pembenahan yang tepat sesuai kriteria yang

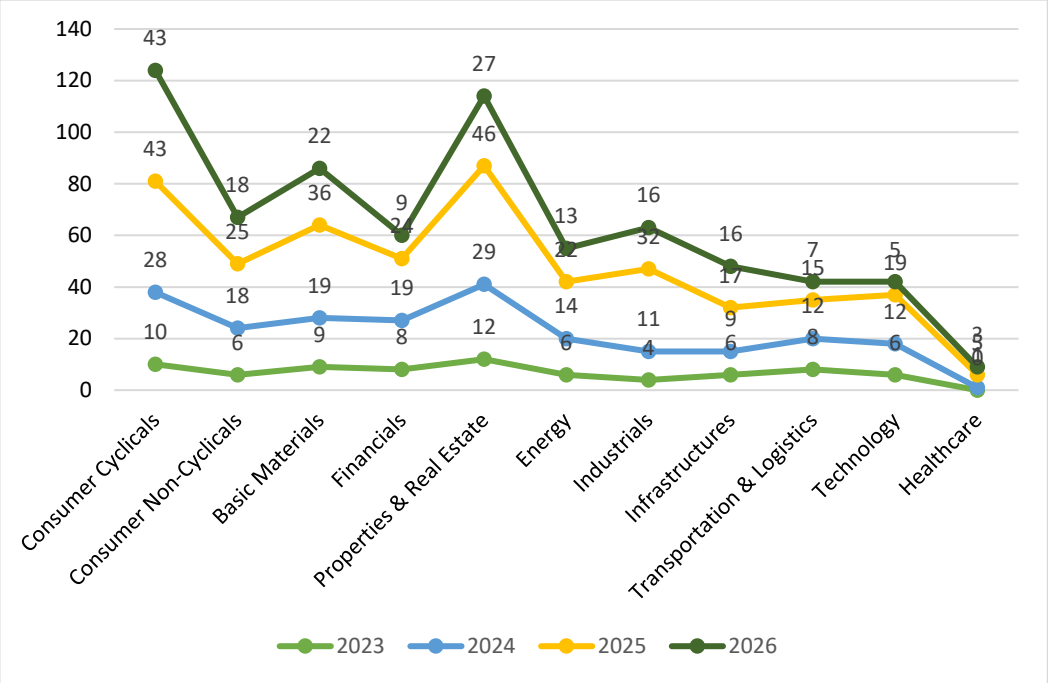
dikenakan kepada perusahaan (Bursa Efek Indonesia, 2024c). Emiten yang masuk dalam PPK menghadapi konsekuensi langsung berupa pembatasan mekanisme perdagangan, penurunan likuiditas saham, meningkatnya kehati – hatian investor, serta tekanan reputasional yang dapat berdampak pada kualitas pelaporan keuangan yang disampaikan kepada publik, di mana emiten yang berada di PPK lebih dari satu tahun berturut – turut akan dikenakan suspensi efek sesuai peraturan nomor I-X BEI (BEI, 2024; CNBC Indonesia, 2024). Kondisi ini tercermin pada kasus PT Barito Renewables Energi Tbk (BREN) yang mengalami penurunan harga saham secara signifikan setelah masuk PPK pada Mei 2024, sehingga mengindikasikan bahwa penempatan PPK membawa tekanan nyata terhadap persepsi pasar atas kondisi fundamental emiten (Liputan6.com, 2024;Kompas.id, 2024).

Sejak PPK resmi diimplementasikan, jumlah emiten yang masuk dalam papan terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada periode awal, BEI menempatkan 171 emiten ke Papan Pemantauan Khusus yang berasal dari perpindahan papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi (Melani, 2023). Sepanjang tahun 2023, terdapat 100 emiten tambahan yang masuk sehingga total emiten yang berada di PPK mencapai 190 perusahaan tercatat (Katadata, 2023). Memasuki tahun 2024, emiten bertambah dengan cepat, hanya dalam rentang Januari hingga pertengahan Februari 2024 BEI telah mencatat 219 emiten yang masuk ke daftar tersebut sejak 2021, data BEI menunjukkan bahwa dari 914 emiten yang tercatat sebanyak 220 di antaranya atau 24,07% berada di PPK pada awal 2024 (Katadata, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian perusahaan menghadapi tekanan pada kinerja keuangan, terutama pada sektor *consumer cyclicals* yang memiliki

karakteristik permintaan yang sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi (Alfi & Suwaidi, 2023; Tjhin et al., 2024).

Sumber diolah : BEI https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/daftar-efek pemantauan-khusus.

Dari grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah emiten aktif pada Papan

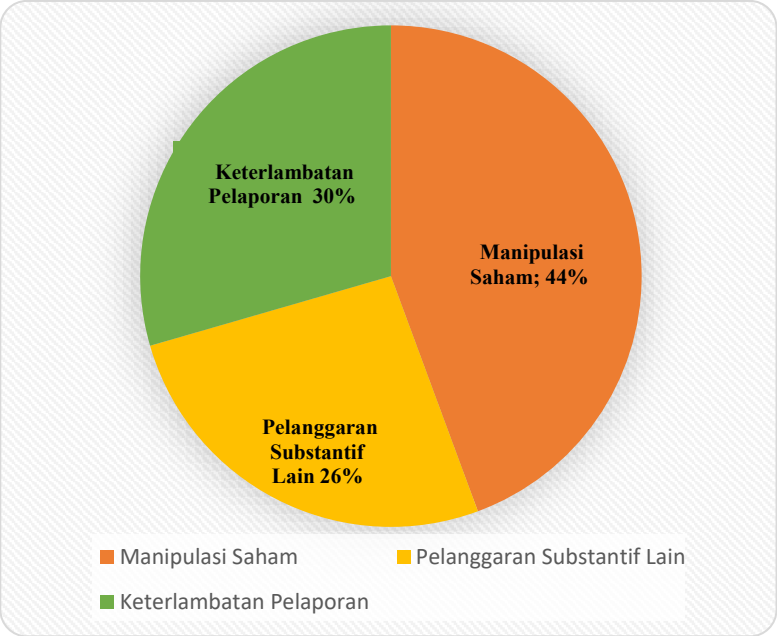


Gambar 1.5 Perkembangan Jumlah Emiten Aktif PPK BEI per Sektor IDX-IC Periode 2023–2026

Pemantauan Khusus BEI berdasarkan sektor IDX-IC selama periode 2023 – 2026. Sektor *Consumer Cylicals* mencatat tren pertumbuhan yang konsisten, dari 10 emiten pada 2023 meningkat 18% menjadi 28 emiten 2024, dan kembali naik 53,6% pada tahun 2025 menjadi 43 emiten. Pada 2026 sektor *Consumer Cylicals* tertinggi dengan 43 emiten efektif di PPK (Bursa Efek Indonesia, 2026). Tren tersebut menunjukkan bahwa tekanan kepatuhan pelaporan pada sektor *Consumer Cylicals* terus meningkat secara konsisten sepanjang periode pengamatan Faktor ini di dorong oleh kondisi fundamental yang negatif dari sisi pendapatan, profitabilitas,

ekuitas, serta karakteristik emiten yang umumnya berskala *small – mid caps* dengan daya tahan yang terbatas terhadap tekanan pasar (Putrantyo, 2023). Kerentanan tersebut semakin dalam karena pendapatan sektor yang bersiklus, di mana ketika daya beli masyarakat melemah akibat tekanan ekonomi permintaan terhadap produk *consumer cyclicals* ikut disesuaikan secara signifikan (Alfi & Suwaidi, 2023; Tjhin et al., 2024)

Lemahnya kondisi fundamental pada emiten memicu praktik manipulasi informasi keuangan di BEI, sehingga akurasi informasi yang diterima investor menurun dan kepercayaan investor terhadap pasar modal melemah (Harahap, 2026;(Narsa et al., 2023).Praktik perdagangan saham tidak hanya menjadi isu pada pihak pelaku pasar, tetapi telah teridentifikasi melalui tindakan penegakan hukum oleh otoritas pengawas sektor keuangan. Laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pada 2026 terdapat 151 pihak yang dikenai sanksi denda sebesar Rp 240,65 miliar terkait manipulasi perdagangan saham dan total sanksi administratif sebesar Rp 542,49 miliar terhadap 3.418 pihak atas berbagai pelanggaran di pasar modal (Harahap, 2026).



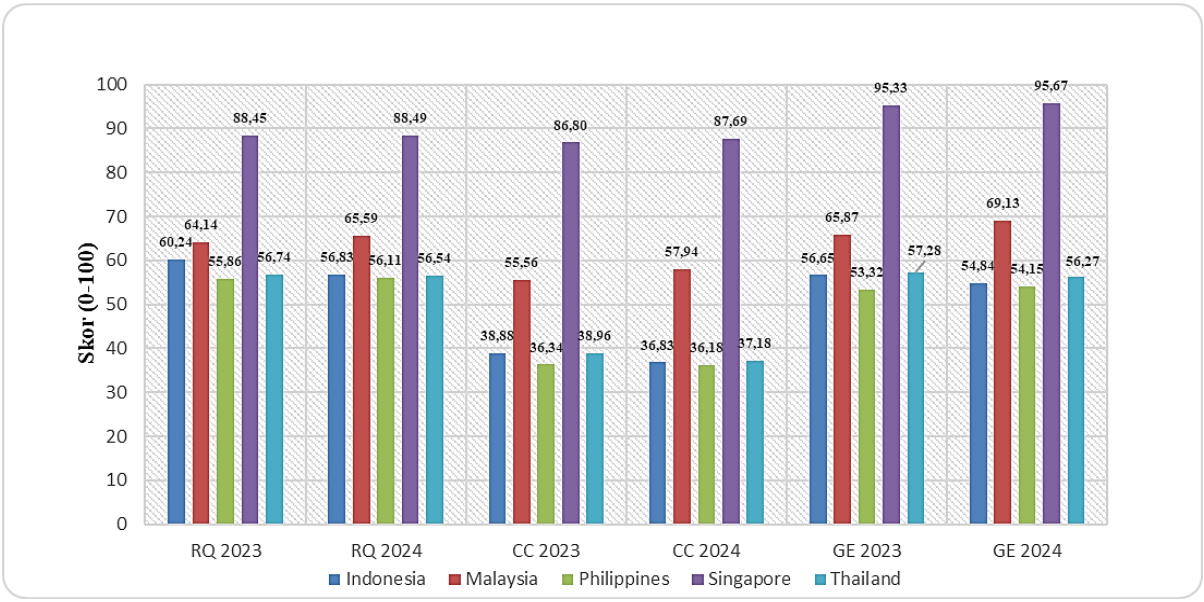
Gambar 1.6 Komposisi Proporsi Sanksi Denda Administratif OJK atas Pelanggaran Pasar Modal, Kumulatif Periode 2022–Januari 2026.

Sumber di olah: Siaran Pers No. SP 38/GKPB/OJK/II/2026. https://ojk.go.id/.

OJK telah mengidentifikasi bahwa praktik manipulasi harga berkaitan dengan penyimpangan dalam proses *Initial Public Offering* (IPO), seperti rasio saham yang tidak mencerminkan kondisi investor, lemahnya proses *customer due diligence*, serta penggunaan informasi yang tidak akurat (Harahap, 2026). Kondisi ini menunjukkan lemahnya transparansi dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan yang sering dikaitkan dengan praktik manipulasi laporan keuangan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kualitas pelaporan keuangan emiten di pasar modal Indonesia dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan internal perusahaan (Narsa et al., 2023).

Kualitas laporan keuangan (*Financial Reporting Quality*) di pasar berkembang secara umum berada di bawah pasar maju. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya perlindungan investor, yang terbukti melemahkan

antara hubungan FRQ dan efisiensi investasi, kondisi ini berbeda dengan pasar maju diaman perlindungan investor yang kuat dapat memberikan dampak positif FRQ terhadap keputusan investasi (Khan et al., 2024). Kondisi ini tercermin di Indonesia, di mana investor terbukti merespons laba yang dilaporkan secara positif meskipun menunjukkan *akrual diskresioner*, sehingga mengindikasikan bahwa asimetri informasi antara manajemen dan investor masih menjadi tantangan struktural dalam kualitas pelaporan keuangan (Lestari & Muthmainnah, 2025). Konteks praktik pelaporan keuangan di Indonesia merujuk pada data *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang mencakup *Regulatory Quality* (RQ) sebagai cerminan kemampuan pemerintah dalam merumuskan regulasi yang mendukung sektor swasta, *Control of Corruption* (CC) untuk mengukur sejauh mana kekuasaan publik tidakdisalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dan *Government Effectiveness* (GE) menggambarkan kualitas layanan publik dan kapasitas birokrasi secara keseluruhan. (Kaufmann & Kraay, 2024).



Gambar 1.7 Perbandingan Skor *Worldwide Governance Indicators* (WGI) Negara-Negara ASEAN Tahun 2023–2024

Sumber diolah: *Worldwide Governance Indicators*, 2025 Revision. Washington, DC: World Bank Group (http://www.govindicators.org/) oleh penulis.

Dari grafik di atas menunjukkan posisi Indonesia dibanding empat negara ASEAN lainnya pada 3 aspek WGI. Aspek CC, nilai indeks Indonesia tahun 2023 adalah 38,88 berada diposisi kedua terendah setelah Filipina (36,34) berada jauh di bawah rata – rata lima negara sebesar 51,31. Thailand mencatat nilai indeks yang hampir sama dengan Indonesia 38,96, yang menunjukkan bahwa pengawasan korupsi menjadi titik yang relatif lemah di beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia. Pada aspek GE, Indonesia berada di posisi ke empat dengan nilai indeks 56,65 di bawah rata – rata 65,69. Dari ketiga nilai indeks Indonesia mengalami penurunan dari 2023 ke 2024, di mana RQ turun 3,41 skor dari 56,74 menjadi 53,33 atau melemah sebesar 6,01%, CC turun 2,05 skor dari 38,88 menjadi 36,83 atau melemah sebesar 5,27% , dan GE turun 1,81skor dari 56,65 menjadi 54,84 atau melemah sebesar 3,2%, hal ini mengindikasikan bahwa lemahnya kualitas pelaporan keuangan korporat di Indonesia berasal lebih dari satu aspek (World Bank, 2025).

Tekanan terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) bersifat multidimensional, sehingga penurunan kualitas pelaporan keaungan tidak dapat direpresentasikan hanya melalui satu proxy tunggal. (P. Dechow et al., 2010) menunjukkan bahwa kualitas laba direpresentasikan melalui berbagai indikator seperti kualitas laba mulai dari *persistence, accruals, smoothness,timeliness*, hingga investor *responsiveness*. Perbedaan ini menegaskan bahwa kualitas laba tidak bersifat tunggal karena kualitas laba bersifat kontingen. Kualitas audit merupakan

salah satu faktor yang konsisten memengaruhi *Financial Reporting Quality* (FRQ). (Verma et al., 2024) menemukan bahwa di India sebagai *emerging market*, kelengkapan audit seperti ukuran auditor, besaran *fee*, masa perikatan dan keberadaan *joint auditor* berhubungan negatif dengan manajemen laba. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensi dalam mengukur *Financial Reporting Quality* (FRQ) melalui tiga proxy, yaitu *Earnings Aggressiveness* (EA), *Loss Accruals* (LA), dan *Earnings Smoothing* (ES). Pemilihan proxy tersebut mengacu pada kerangka yang dikembangkan oleh (Iatridis, 2010) dan (P. Dechow et al., 2010).

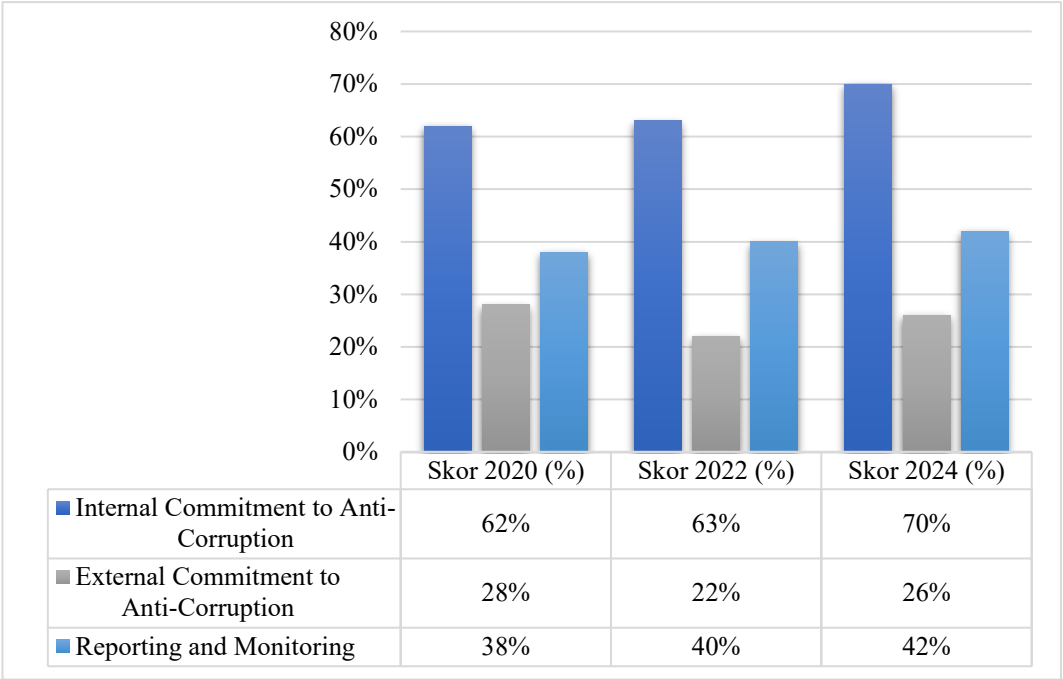
Proxy pertama adalah *Earning Aggressiveness* (EA), yaitu seberapa besar tingkat *akrual diskresioner* yang diakui perusahaan melampaui arus kas operasinal aktualnya, diukur dengan *scaled total accruals* menggunakan *Modified Jones Model* (Dechow, Sloan, 1995), di mana tekanan finansial dan lemahnya tata kelola di pasar berkembang terbukti menjadi faktor utama tingginya EA pada emiten yang berada di bawah pengawasan regulasi (Mlawu et al., 2025).

Berbeda dengan EA yang berfokus pada besaran akrual, *Loss Accruals* (LA) menilai kemampuan akrual periode berjalan dalam memprediksi arus kas operasional masa depan melalui residual model (P. M. Dechow & Dichev, 2002) yang diperluas McNichols (2002), dalam konteks ini EA dan LA tidak bersifat redundan, karena perusahaan dapat menunjukkan tingkat agresivitas akrual yang rendah namun tetap menghasilkan akrual dengan tingkat *noise* yang tinggi sehingga kurang mampu merefleksikan arus kas operasional (P. Dechow et al., 2010).

Proxy ketiga adalah *Earnings Smoothing* (ES) yang mengukur sejauh mana manajemen menggunakan akrual diskresioner untuk meredam fluktuasi laba, diukur melalui rasio variabilitas laba terhadap variabilitas arus kas operasional (Tucker & Zarowin, 2006), pada perusahaan yang mengalami tekanan finansial berkepanjangan, praktik *Earnings Smoothing* (ES) umumnya didorong oleh kebutuhan mempertahankan laba di atas ambang batas perjanjian utang (*debt threshold covenant*), sebagaimana diidentifikasi dalam konteks pasar berkembang (Persakis & Iatridis, 2015).

Kombinasi EA, LA, dan ES dipilih karena masing – masing proxy merepresentasikan aspek yang berbeda dari kualitas laba. EA mengukur agresivitas pengakuan akrual, LA menilai kemampuan akrual dalam menggambarkan arus kas operasional, dan ES mencerminkan upaya manajemen melakukan perataan laba. Ketiga proxy kualitas laba menunjukkan hasil yang berbeda pada perusahaan yang sama (P. Dechow et al., 2010), Hal ini berkaitan dengan perbedaan tingkat transparansi korporat di masing – masing negara.

Transparansi informasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan pasar modal yang kuat. Secara global, keterbukaan informasi perusahaan harus terus meningkat seiring dengan perkembangan regulasi pelaporan serta ekspetasi pemangku kepentingan terhadap kualitas pengungkapan korporat. Praktik pengungkapan informasi pada emiten di negara berkembang, termasuk Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan, sebagaimana tercermin dari data *corporate disclosure* emiten Indonesia berikut ini (Loh, Nguyen, 2024)



	Skor 2020 (%)	Skor 2022 (%)	Skor 2024 (%)
Internal Commitment to Anti-Corruption	62%	63%	70%
External Commitment to Anti-Corruption	28%	22%	26%
Reporting and Monitoring	38%	40%	42%

Gambar 1.8 Skor Rata-rata *Corporate Disclosure* Emiten Indonesia Berdasarkan Dimensi Pengungkapan Periode 2020, 2022, dan 2024

Sumber diolah: Loh, Lawrence and Nguyen, (2024), NUS *Business School.*

Grafik 1.8 menunjukkan perkembangan skor rata – rata *corporate disclosure* emiten Indonesia berdasarkan tiga pengungkapan pada periode 2020, 2022, dan 2024. *Internal commitment* mengalami peningkatan dari 62% menjadi 70%, namun *external commitment* mencatat skor terendah sebesar 26% dan *reporting and monitoring* hanya mencapai 42%. Secara keseluruhan, skor rata – rata *corporate disclosure* Indonesia pada tahun 2024 mencapai 48% (Loh, Nguyen, 2024), yang mengindikasikan bahwa sebagian besar emiten Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang substansial dalam praktik pengungkapan informasi sukarela kepada pemangku kepentingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia masih memiliki jarak antara kewajiban pelaporan minimum yang ditetapkan oleh regulasi dengan praktik pengungkapan informasi secara sukarela

kepada pemangku kepentingan, sehingga memperkuat urgensi transparansi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Kesenjangan dalam praktik pengungkapan informasi sukarela dalam penelitian ini merujuk pada informasi keuangan dan tata kelola yang melebihi ketentuan regulasi, bukan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Tahir et al., 2023). Kesenjangan tersebut mencerminkan keberlanjutan asimetri informasi antara manajemen dan investor di pasar berkembang. Perbedaan tingkat transparansi antar perusahaan tidak hanya mengenai kepatuhan regulasi, tetapi menentukan seberapa luas ruang informasi yang tersedia bagi struktur tata kelola perusahaan dapat secara efektif menghasilkan FRQ yang berkualitas (Liao et al., 2024). Perusahaan yang aktif memaparkan informasi keuangan cenderung memiliki informasi yang lebih kondusif, sehingga dapat menekan perilaku oportunistik manajemen secara konsisten (Huang et al., 2025), tetapi ketika transparansi perusahaan rendah menyebabkan mekanisme tata kelola yang beroperasi memiliki keterbatasan akses informasi, sehingga untuk menekan perilaku oportunistik menjadi tidak optimal(Ali et al., 2022).

Kondisi ini terjadi karena tingkat transparansi perusahaan mencerminkan sejauh mana informasi tersedia bagi pasar dalam menilai kualitas perusahaan. *Signaling theory* Spence, (1973) menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan pengungkapan informasi sebagai sinyal kepada pasar untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi investor. Sinyal ini memberi informasi mengenai kualitas perusahaan yang tidak dapat diamati langsung dari luar, sehingga membantu investor dalam mengambil keputusan di tengah keterbatasan informasi

yang mereka miliki. Perusahaan dengan kondisi fundamental yang baik berpotensi mengungkapkan informasi yang lebih luas bukan karena kewajiban regulasi, tetapi untuk membedakan dari perusahaan lain, sehingga keterbukaan informasi memperkuat kredibilitas yang disampaikan kepada pasar (Connelly et al., 2025). Transparansi perusahaan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara mekanisme tata kelola dan kualitas pelaporan keuangan (Liao et al., 2024).

Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya. Ali et al., (2022) meneliti 230 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Pakistan *Stock Exchange* menemukan bahwa transparansi terbukti memoderasi hubungan antara mekanisme *corporate governance* dan kualitas informasi keuangan perusahaan. Sejalan dengan itu, Abed et al., (2022) menemukan bahwa transparansi dan *disclosure* terbukti memoderasi hubungan antara determinan *creative accounting* dan *Finnacial Reporting Quality* pada sektor perbankan komersial. Penelitian di Indonesia, Saputra et al., (2025) menunjukkan bahwa transparansi korporat memoderasi hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Bukti empiris terdahulu memperkuat relevansi pengujian peran moderasi transparansi dalam penelitian ini, pada emiten sektor Consumer Cylicals di Papan Pemantauan Khusus (PPK) BEI. Perusahaan yang berada di PPK memiliki kondisi yang beragam, baik dari sisi fundamental maupun praktik pengungkapan informasi keuangan dan tata kelola kepada pemangku kepentingan. Keberagaman tersebut tercermin pada perbedaan tingkat transparansi antar perusahaan emiten yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Saputra et al., 2025). Perbedaan tingkat transparansi di setiap emiten menjadi dasar bahwa transparansi korporat memengaruhi hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan, termasuk komite audit dan kualitas pelaporan keuangan (Ali et al., 2022; Abed et al., 2022).

Efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang tinggi masih menjadi permasalahan struktural di pasar berkembang yang memiliki sistem pengawasan lebih rentan dibandingkan pasar maju (Mardessi, 2022). Kajian empiris membuktikan bahwa pengawasan komite audit ditentukan oleh sejauh mana anggotanya mampu berfungsi secara independen dari pengaruh manajemen, ketika independensi tidak terpenuhi, netralitas dalam proses pelaporan keuangan dapat terpengaruh (Bawuah, 2024). Di Indonesia, independensi diatur secara jelas melalui POJK Nomor 55/POJK.04/2015, yang mewajibkan anggota komite audit eksternal tidak memiliki keterikatan kepentingan manajemen, dewan komisaris, dan pemegang saham pengendali, dalam penerapannya emiten BEI cenderung memenuhi ketentuan minimum mengenai proporsi anggota independen sesuai regulasi yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Independensi komite audit pada penelitian ini diukur menggunakan proporsi anggota independen terhadap total anggota komite audit dalam satu periode fiskal. Penelitian terdahulu pada perusahaan non keuangan di *Amman Stock Exchange* pada tahun 2016 – 2023 menemukan bahwa independensi komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Alqatamin, 2024). Temuan serupa pada emiten di Ghana menemukan bahwa independensi komite

audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, yang mengindikasikan bahwa keberadaan anggota independen berpotensi membatasi perilaku oportunistik manajemen (Bawuah, 2024). Berbeda pada penelitian sebelumnya, pada perusahaan di kawasan MENA menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap real *earnings management* (Almarayeh, 2024). Hasil yang sama diperoleh Andini et al., (2025) pada sektor kesehatan di BEI periode 2014 – 2023 menunjukkan hasil yang serupa, di mana independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Inkonsistensi temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas independensi komite audit dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan kondisi tata kelola. Seluruh emiten sektor Consumer Cyclicals di PPK BEI telah memenuhi ketentuan minimum independesi komite audit sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015. Kondisi ini secara empiris belum menunjukkan efektivitas pengawasan komite audit dalam menghadapi tekanan finansial perusahaan.

Efektivitas pengawasan komite audit tidak hanya dipengaruhi oleh independensi anggota, tetapi oleh kecukupan jumlah anggota atau *Audit Committee Size* (ACS) dalam menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh. Secara global, ukuran komite audit yang proporsional mendukung pembagian beban kerja yang lebih seimbang sehingga proses pengawasan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara kolektif (Alqatamin, 2024). Di Indonesia hal ini diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015 mewajibkan komite audit memiliki minimal 3 anggota, sehingga banyak emiten di BEI mempertahankan jumlah anggota komite audit pada batas minimum yang diwajibkan regulasi (Otoritas Jasa Keuangan,

2015). Fenomena ini terbukti pada emiten sektor *Consumer Cylicals* di Papan Pemantauan Khusus (PPK) BEI periode 2022 – 2024, data terkait fenomena penelitian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Distribusi Ukuran Komite Audit atau *Audit Committee Meeting* (ACS) Emiten Consumer Cyclicals PPK BEI Periode 2022–2024

Jumlah Anggota Komite Audit	**Emiten 2022**	**Emiten 2023**	**Emiten 2024**
3 anggota (batas minimum POJK)	100%	100%	100%
4 anggota	0%	0%	0%
5 anggota ke atas	0%	0%	0%

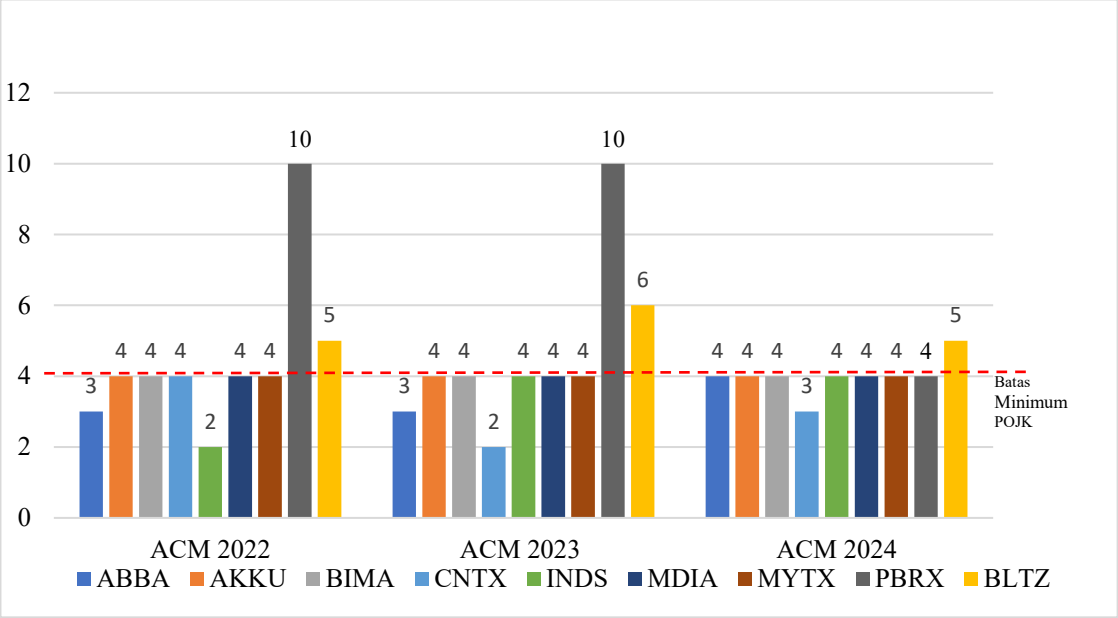
Sumber diolah: Laporan Tahunan ABBA, AKKU, BIMA, CNTX, INDS,MDIA, MYTX, PBRX, BLTZ periode 2022 – 2024.

Berdasarkan tabel 1.2, emiten *Consumer Cylicals* di PPK secara konsiste hanya menempatkan 3 anggota dalam komite audit sepanjang 3 tahun pengamatan. Kondisi ini dapat mencerminkan kecenderungan perusahaan di PPK dalam memenuhi batas minimum regulasi pembentukan komite audit, meskipun kualitas pengawasan yang dihasilkan berbeda antar perusahaan.

Dalam penelitian ini, *Audit Committe Size* (ACS) diukur berdasarkan jumlah anggota aktif dalam satu periode fiskal, temuan empiris menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan non keuangan di Amman *Stock Exchange* pada periode 2016 – 2023 (Alqatamin, 2024). Hasil tersebut diperkuat oleh temuan empiris di Ghana yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit, independensi, dan frekuensi rapat secara konsisten membatasi praktik manajemen laba (Bawuah,

2024). Hasil berbeda ditemukan pada penelitian di perusahaan Malaysia yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *real earnings management* (Hasan et al., 2020). Bukti empiris yang mendukung, di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada 188 emiten non keuangan menunjukkan dimana penambahan komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Algrady et al., 2025). Kondisi ini masih terbatas pada penelitian sebelumnya, khususnya pada emiten sektor Consumer Cyclicals di PPK BEI yang secara konsisten menetapkan tiga anggota komite audit sesuai batas minimum regulasi selama periode pengamatan.

Kualitas pengawasan komite audit tidak hanya bergantung pada struktur dan jumlah anggota, tetapi juga pada pelaksanaan fungsi pengawasan melalui pertemuan yang terjadwal dan terstruktur. Dalam tata kelola perusahaan, frekuensi rapat komite audit atau *Audit Committe Meeting* (ACM) melalui rapat rutin, komite audit melakukan evaluasi pengendalian internal dan mengidentifikasi potensi penyimpangan sebelum laporan keuangan dipublikasikan (Alqatamin, 2024). Otoritas Jasa Keuangan mengatur dalam No. 55/POJK.04/2015 bahwa komite audit wajib mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam tiga bulan, sehingga minimal yang diwajibkan adalah empat kali dalam satu tahun fiskal (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Tidak hanya terbatas pada jumlah anggota yang sama pada batas minimum, emiten *Consumer Cylicals* di PPK BEI menunjukkan keberagaman frekuensi rapat komite audit yang tersaji pada grafik berikut.



Gambar 1.9 Frekuensi Rapat Komite Audit Emiten Consumer Cyclicals PPK BEI Periode 2022–2024

Sumber diolah: *Annual Report* Emiten Consumer Cyclicals PPK 2022 – 2024. https://idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/.

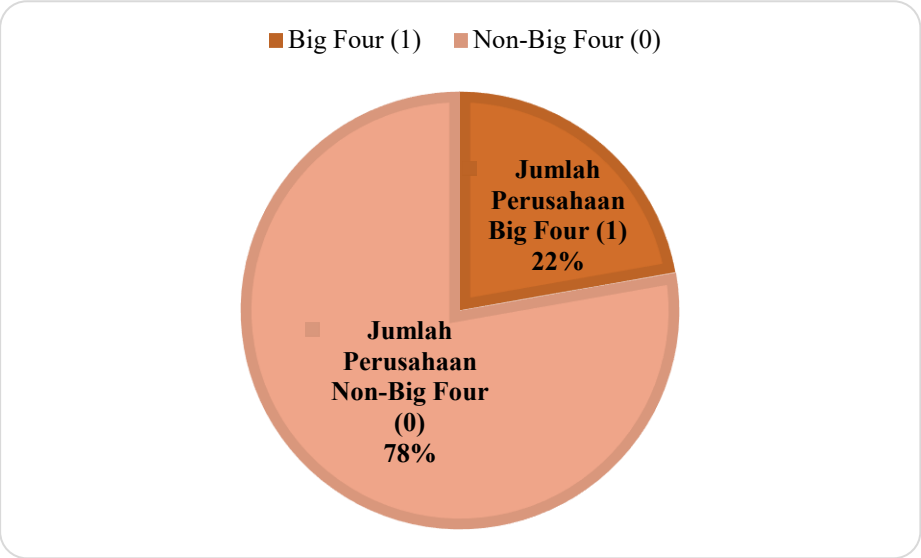
Grafik 1.9 menunjukkan bahwa PT Citra Tubindo Tbk (CNTX) pada tahun 2022 dan 2023 hanya mengadakan rapat sebanyak dua kali, sementara PT Indospring Tbk (INDS) pada tahun 2022 tercatat hanya dua kali, kedua emiten tersebut berada di bawah batas minimum regulasi yang sudah ditetapkan. Berbeda dengan kondisi tersebut, PT Pan Brothers Tbk (PBRX) pada tahun 2022 dan 2023 mencatat frekuensi tertinggi mencapai sepuluh kali rapat dalam satu periode fiskal, perbedaan frekuensi rapat menunjukkan bahwa regulasi minimum belum mencerminkan intensitas pengawasan yang konsisten pada emiten *Consumer Cyclicals* di PPK BEI (Bursa Efek Indonesia, 2024a).

Frekuensi rapat komite audit dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite audit dalam satu periode fiskal, sebagaimana digunakan oleh penelitian di Mesir yang menguji 78 perusahaan di sektor non

keuangan menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Attia et al., 2025). Berbeda dengan temuan sebelumnya, penelitian pada 90 perusahaan non keuangan di Amman *Stock Exchange* periode 2010 – 2017 menunjukkan bahwa frekuensi rapat tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Mardessi, 2022). Temuan ini konsisten dengan penelitian pada 188 perusahaan non keuangan di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, di mana frekuensi rapat tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang proksikan dengan manajemen laba (Algrady et al., 2025). Perbedaan frekuensi rapat antar emiten Consumer Cyclicals di PPK BEI yang berada pada rentang dua hingga sepuluh kali dalam satu tahun fiskal, mencerminkan kondisi pengawasan masih terbatas dalam studi sebelumnya.

Kualitas pengawasan laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme internal perusahaan, tetapi oleh kapasitas auditor atau disebut sebagai *Auditor Type* (AT), yakni pihak yang dipilih manajemen untuk melakukan verifikasi independen terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan (N. M. Tran & Tran, 2023). Kajian empiris menunjukkan bahwa *Deloitte, Ernst and Young, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers* cenderung mendominasi audit perusahaan publik berskala besar di berbagai negara karena memiliki kapasitas dan reputasi yang lebih kuat dibanding KAP Non – Big 4 (T. G. T. Tran et al., 2025). Di Indonesia, praktik audit emiten di BEI menunjukkan kecenderungan yang konsisten dengan temuan sebelumnya. Di mana KAP afiliasi Big 4 cenderung menangani emiten berkapitalisasi besar, sedangkan emiten kecil dan menengah menggunakan KAP Non – Big 4 sebagai auditor eksternal (Yolandita, R. and Cahyonowati, 2022).

Penelitian ini mengkaji kondisi tersebut pada emiten *Consumer Cyclicals* di PPK BEI, karena tekanan finansial yang dihadapi perusahaan dapat memengaruhi pemilihan auditor eksternal yang dapat berdampak pada kualitas pelaporan keuangan di tengah kondisi tata kelola yang rentan (Kazmi et al., 2024). Diagram berikut menyajikan komposisi tipe auditor yang digunakan selama periode pengamatan.



Gambar 1.10 Komposisi Tipe Auditor Big 4 dan Non-Big 4 pada Emiten *Consumer Cyclicals* PPK BEI Periode 2022–2024

Sumber diolah: *Annual Report* Emiten Consumer Cyclicals (Bursa Efek Indonesia, 2024a).

Gambar 1.10 menunjukkan bahwa dari total 27 observasi emiten *Consumer Cyclicals* di PPK BEI selama periode 2022 – 2024, sebanyak 77,78% atau 21 observasi menggunakan KAP Non – Big 4 sebagai auditor eksternal, sementara 22,22% atau 6 observasi diaudit oleh KAP Big 4 yaitu PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) dan PT Citra Tubindo Tbk (CNTX) menggunakan KAP Big 4 selama periode pengamatan.

Bukti empiris dari berbagai konteks pasar belum menunjukkan hasil yang konsisten mengenai pengaruh perbedaan *auditor type* terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian pada 35 perusahaan di Tadawul Saudi *Stcok Exchange* periode 2017 – 2021 menemukan bahwa KAP Big 4 yang diukur melalui variabel *dummy* berpengaruh negatif signifikan, yang mengindikasikan bahwa auditor berskala global memiliki kapasitas lebih kuat dalam membatasi praktik manajemen laba berbasis akrual dibanding KAP Non – Big 4 (Alhazmi et al., 2024). Hasil yang konsisten ditemukan terhadap penelitian 566 perusahaan di Bursa Malaysia periode 2011 – 2022, di mana auditor Big 4 terbukti berpengaruh negatif dan signifikan dalam membatasi praktik manajemen laba (Nuhu et al., 2024). Sejalan dengan temuan sebelumnya penelitian terhadap 331 perusahaan di Vietnam periode 2013 – 2020 menghasilkan bahwa KAP Big 4 berpengaruh signifikan manipulasi aktivitas riil dibanding manajemen laba berbasis akrual (N. M. Tran & Tran, 2023).

Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian di Ho Chi Minh *Stock Exchange* Vietnam menunjukkan bahwa KAP Big 4 tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga perbedaan KAP Big 4 dan Non – Big 4 dalam membatasi praktik pelaporan oportunistik tidak selalu terbukti secara empiris (Duong Thi, 2023). Inkonsistensi temuan empiris menunjukkan bahwa pengaruh auditor type eksternal terhadap kualitas laporan keuangan tidak selalu konsisten pada setiap emiten. Oleh karena itu, penelitian pada emiten *consumer cyclicals* di PPK BEI menjadi relevan karena tekanan finansial yang berkepanjangan dapat meningkatkan kerentanan tata kelola perusahaan.

Penelitian ini mengisi gap literatur pada tiga kebaruan. Pertama, penelitian yang menguji karakteristik komite audit terhadap FRQ pada emiten *Consumer Cyclicals* di PPK BEI yang baru diterapkan pada tahun 2023 masih terbatas. Kedua, penelitian sebelumnya di Indonesia pada umumnya menggunakan kualitas audit sebagai variabel moderasi, sedangkan penelitian ini menggunakan *Transparency Corporate* yang diukur melalui VDI belum banyak diuji dalam konteks yang sama. Ketiga, penggunaan tiga proksi FRQ secara simultan memberikan gambaran yang komprehensif dibanding menggunakan satu proksi.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup penelitian, makan penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Papan Pemantauan Khusus (PPK) Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdaftar selama periode 2022 – 2024.
2. Sampel penelitian ini dibatasi pada Perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan dapat diakses publik selama periode penelitian.
3. Variabel independen dalam penelitian ini dibatasi pada karakteristik komite audit, yaitu *Audit Committee Independence* (ACI*), Audit Committee Size* (ACS), *Audit Committee Meetings* (ACM), dan *Auditor Type* (AT).
4. Variabel dependen yaitu *Financial Reporting Quality* (FRQ), yang diukur menggunakan *Earnings Aggressivness* (EA), *Loss Accruals* (LA), dan *Earnings Smoothing* (ES).

5. Transparansi Perusahaan dalam penelitian ini di proksikan dengan Voluntary Disclosure Index (VDI).
6. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan Perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *Audit Committee Independence* (ACI) berpengaruh terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024?
2. Apakah *Audit Committee Size* (ACS) berpengaruh terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024?
3. Apakah *Audit Committee Meeting Frequency* (ACM) berpengaruh terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024?
4. Apakah *Auditor Type* (AT) berpengaruh terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024?
5. Apakah transparansi berpengaruh terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024?

6. Apakah transparansi memoderasi pengaruh *Audit Committee Independence* (ACI) terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024?
7. Apakah transparansi memoderasi pengaruh *Audit Committee Size* (ACS) terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024?
8. Apakah transparansi memoderasi pengaruh *Audit Committee Meeting Frequency* (ACM) terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024?
9. Apakah transparansi memoderasi pengaruh *Auditor Type* (AT) terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Audit Committee Independence* (ACI) terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Audit Committee Size* (ACS) terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Audit Committee Meeting Frequency* (ACM) terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Auditor Type* (AT) terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024.
6. Untuk menguji dan menganalisis peran moderasi transparansi pada pengaruh *Audit Committee Independence* (ACI) terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024.
7. Untuk menguji dan menganalisis peran moderasi transparansi pada pengaruh *Audit Committee Size* (ACS) terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024.
8. Untuk menguji dan menganalisis peran moderasi transparansi pada pengaruh *Audit Committee Meeting Frequency* (ACM) terhadap *Financial*

Reporting Quality (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024.

9. Untuk menguji dan menganalisis peran moderasi transparansi pada pengaruh *Auditor Type* (AT) terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada perusahaan *consumer cyclicals* di Papan Pemantauan Khusus BEI periode 2022–2024.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

a. Penelitian ini memperluas Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976) dengan menunjukkan bahwa efektivitas komite audit dipengaruhi oleh Tingkat transparansi Perusahaan.

b. Penelitian ini menambah literatur bahwa pengaruh komite audit terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) bergantung pada tingkat *Voluntary Disclosure* (VDI).

c. Penelitian ini memperkaya pemahaman hubungan antara mekanisme internal *governance* dan konteks informasi eksternal Perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi manajemen Perusahaan consumer cyclicals di PPK BEI, peningkatan FRQ tidak cukup hanya melalui struktur komite audit, tetapi melalui peningkatan Voluntary Disclosure (VD).

b. Komite audit dan transparansi pengungkapan berkaitan secara simultan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
c. Temuan ini membantu Perusahaan yang berada di PPK dalam meningkatkan kepercayaan investor melalui tata Kelola yang lebih transparan.